

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Minahasa

Jurnal Administrativus Vol 3 No 2, E-ISSN 3026-3018

© Tahun IAN FISH UNIMA. All right reserved ISSN

Idamanwati Gea¹, Sisca B. Kairupan², Steven V. Tarore³

¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

idamanwatigea@gmail.com, siscakairupan@unima.ac.id, steventarore@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Implementation, Regional Government Information System, Community Empowerment

Accepted: 15 Maret 2025

Revised : 1 April 2025

Published: 30 April 2025

The research was conducted at the Ministry of Community Empowerment and Village Affairs of Minahasa Regency. This study uses a descriptive qualitative approach by collecting data through observation, interviews, and documentation. The results of the research show that the implementation of the local government information system application at the Ministry of Community Empowerment and Village Affairs of Minahasa Regency is still not optimal, as evidenced by delays in document submission and employees having to relearn how to use the application every year. After conducting interviews, several factors were identified as causes, including frequent network errors, training for using the application being conducted only once, and the application changing every year.

INTISARI

Kata kunci:

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penelitian ini dilakukan Pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi sistem informasi pemerintah daerah di Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa masih belum optimal, yang dibuktikan dengan adanya keterlambatan dalam pengajuan dokumen dan karyawan harus mempelajari ulang cara menggunakan aplikasi setiap tahun. Setelah melakukan wawancara, beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai penyebabnya antara lain sering terjadinya gangguan jaringan, pelatihan penggunaan aplikasi yang hanya dilakukan sekali, dan aplikasi yang berubah setiap tahun.

I. Pendahuluan

Guna meningkatkan program pembangunan dari Pemerintah di segala bidang sebagai sarana dalam menyampaikan informasi secara sempurna dan melibatkan semua orang secara meluas dengan memanfaatkan daripada penggunaan teknologi. Program pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan mengembangkan potensi ekonomi di wilayah tersebut. Tujuan dari Program Pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintahan daerah biasanya merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan daerah. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini sehingga mampu memberikan dampak positif dan memudahkan pengelolaan pemerintah daerah baik masa kini maupun dimasa yang akan datang.[1]

Permandagri No. 77 tahun 2020 memberikan peraturan tentang peluncuran aplikasi yang akan lebih memudahkan pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan Aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah. Aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah Merupakan sebuah Sistem yang diluncurkan oleh Pemerintah guna mensinergikan keuangan dengan teknologi guna mempermudah penggunaannya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.[2]

Sebelum diterapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah Sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah SIMDA(Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menunjang daripada pengelolaan keuangan daerah.. Program aplikasi SIMDA Keuangan merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan.[3] tetapi Program aplikasi SIMDA ini memiliki kekurangan karena hanya fokus pada pengelolaan keuangan saja, sehingga setelah di terapkan tentang penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah seluruh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) di Indonesia menggunakan SIPD sebagai pengelola keuangan daerah.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah Merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah berupa aplikasi yang mempermudah pemerintahan daerah dalam mengelola sistem dalam pemerintahannya dimana hal ini mempermudah pemerintahan pusat dalam mengawasi pemerintah daerah baik itu dalam sistem pengelolaan keuangannya maupun dalam sistem pengelolaan pembangunan dan lainnya.[4] Aplikasi ini juga memiliki Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan jaminan bagi warga negara untuk mengakses informasi publik yang merupakan salah satu syarat minimal yang harus di lengkapi dari Sistem Informasi.[5]

Dengan adanya peraturan atau penggunaan Aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah ini yang di tunjukkan agar dapat memfasilitasi serta mendorong dan menompang dari sistem data serta informasi pembangunan yang dilakukan disetiap daerah di Indonesia, dan begitu juga dengan pengelolaan keuangannya serta pemerintahan daerahnya. Dengan adanya metode baru ini sehingga pemerintahan daerah dan pusat bisa saling berhubungan secara langsung serta pemerintahan pusat bisa melihat, menilai, dan mengontrol setiap daerah dalam melakukan pengelolaan terhadap keuangannya. Dengan adanya SIPD ini juga dapat memberikan dampak positif kepada setiap daerah dimana dapat meningkatkan kinerja dari setiap pegawai melalui pesatnya teknologi atau berbasis teknologi sehingga mampu meningkatkan database (data yangn sistematis) yang ada di setiap daerah dan dengan demikian pemerintah pusat dapat menilai setiap potensi,bakat, sumber daya yang dimiliki setiap daerah dalam berkembangnya sistem informasi yang saat ini semakin pesat. Aplikasi ini mempunyai tiga peranan penting dalam sistem informasi yaitu yang pertama sebagai perencanaan pembangunan daerah, dua sebagai pengelola keuangan daerah dan yang ketiga yaitu melakukan pengawasan atau pembinaan pada pada setiap daerah. Dinas PMD Kabupaten Minahasa merupakan salah satu dinas yang menggunakan Aplikasi Sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang telah di sampaikan oleh pemerintah bahwa setiap pemerintah daerah wajib menggunakan Aplikasi SIPD dalam sitem pemerintahan dan pengelolaan setiap daerah.

Penggunaan aplikasi SIPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa sudah baik namun masih ada beberapa kekurangan dan kendala dalam penggunaannya seperti adanya gangguan jaringan atau jaringan yang sering error hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengiriman berkas dan penginputan data, kemudian sumber daya yang masih kurang dalam penggunaan aplikasi sering diakibatkan karena setiap tahunnya aplikasi mengalami perubahan yang membuat para pegawai harus kembali mempelajari

cara penggunaan aplikasinya kemudian pelatihan yang adakan untuk penggunaan aplikasi hanya satu kali pada awal aplikasi SIPD di terapkan.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif .dimana menurut Deddy Mulyana Penelitian Kualitatif yaitu “Metode penelitian kualitatif dalam arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik.[6]

Dalam penelitian ini instrumen utama adalah peneliti itu sendiri yang bertanggung jawab atas pengamatan, wawancara, pengumpulan dan analisis data dimana penulis yang berperan langsung dalam proses tersebut. Ada juga beberapa alat bantu yang digunakan seperti catatan lapangan,alat perekam dan kamera untuk dokumentasi. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data skunder, dimana data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara melalui informan terkait. Kemudian data skunder yaitu berasal dari sumbr lain seperti buku, jurnal dan situs web. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mana terbagi menjadi tiga bagian yang dilakukan dilapangan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.[7]

III. Hasil dan Pembahasan

Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan, pengawasan, dan perencanaan pembangunan di tingkat pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Lahirnya aplikasi ini tentunya berdasarkan kebijakan yang di adakan oleh para birokrat atau pejabat dalam pemerintah dimana kebijakan sebagai rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan penduduk negara secara substansial.[8] dalam arti aplikasi ini di terapkan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah ini merupakan bagian penting dalam upaya digitalisasi pemerintahan di Indonesia, yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah pemerintahan yang lebih modern, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Standart Dan Sasaran Kebijakan/ Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Standart dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan Aplikasi Sistem pemerintah daerah adalah sesuai dengan kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah Melalui proses yang transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, kebijakan publik dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan berkembang.[9] dimana dengan di luncurkannya aplikasi SIPD ini membuat para pegawai disetiap daerah lebih mudah dalam melakukan pengelolaan terhadap data baik itu data perencanaan, pembangunan dan juga keuangan.kemudian aplikasi ini bersifat transparan sehingga pemerintah pusat bisa lebih mudah dalam mengkoordinir pemerintah daerah. Good Governance merupakan salah satunya, yaitu menyangkut tentang “transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi wajib melakukan keterbukaan informasi.[10] dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Temuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peluncuran aplikasi ini mempermudah para pegawai pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan terhadap keuangan, perencanaan dan pembangunan daerah namun ada yang menjadi penghambat dimana setiap tahunnya aplikasi ini mengalami perubahan yang mmebuat para pengguna harus kembali mempelajari dan memahami cara penggunaan aplikasinya.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang artinya ketika berbicara mengenai sumber daya, hal ini merujuk pada pengguna Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kerangka production centered development.[11] Setiap tahap pelaksanaan memerlukan peran sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh kebijakan yang telah dirancang secara sistematis dan bebas

dari pengaruh politik Pengguna merupakan elemen kunci dalam keberhasilan penerapan SIPD, karena meskipun aplikasi tersebut dirancang secara teknis untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dan transparansi, pengguna yang terampil dan terlatih akan membuat sistem berjalan dengan optimal. Analisis sumber daya manusia memainkan peran penting dalam perencanaan sumber daya manusia karena memberikan wawasan berbasis data yang dapat membantu dalam membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan kinerja organisasi secara keseluruhan.[12]

Temuan dari hasil penelitian terkait sumber daya pada penelitian ini menyampaikan bahwa Sumber daya pengguna dalam implementasi aplikasi SIPD melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam pemerintahan daerah (pengguna internal) maupun dari luar pemerintahan (pengguna eksternal). Keberhasilan implementasi SIPD sangat bergantung pada keterampilan, pelatihan, dan dukungan yang diterima oleh pengguna, serta sejauh mana sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun sering kali dalam penggunaan aplikasi ini para pengguna kewalahan atau sering terjadinya keterlambatan dalam pengiriman data dikarenakan jaringan yang sering error atau adanya gangguan jaringan kemudian sejak aplikasi ini di terapkan oleh pemerintah digunakan pelatihan diadakan hanya satu kali sedangkan setiap tahunnya aplikasi mengalami perubahan.

3. Ketahanan Sistem

Dengan adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mempermudah tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi penting. Ketahanan sistem aplikasi ini sangat dibutuhkan agar para pegawai dapat menggunakan aplikasi dengan mudah. Ketahanan Sistem Aplikasi SIPD berarti kemampuan sistem untuk tetap beroperasi dengan efektif dan andal meskipun menghadapi gangguan, ancaman, atau perubahan yang tidak terduga. Ketahanan sistem dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mengacu pada kemampuan sistem untuk tetap berjalan dengan baik meskipun menghadapi berbagai hambatan, seperti masalah teknis, ancaman terhadap keamanan, atau kegagalan operasional. Ketahanan sistem ini sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran layanan, keandalan, serta integritas data yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, ketahanan sistem pada aplikasi SIPD harus berfungsi secara efektif agar tujuan penggunaannya tercapai. Aspek ketahanan sistem pada aplikasi SIPD sangat krusial untuk menjaga kelangsungan operasional serta kualitas layanan yang diberikan kepada penggunanya.

Temuan dari hasil penelitian terhadap ketahanan sistem pada penelitian ini adalah Ketahanan sistem pada aplikasi SIPD berfungsi dengan baik dan efisien, sehingga memudahkan pegawai dalam mengelola data. Aplikasi ini juga beroperasi sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mengelola berbagai informasi dan proses administrasi di pemerintah daerah, seperti perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, serta pelayanan publik. Adapun yang menjadi Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan sistem pada aplikasi SIPD antara lain kestabilan jaringan dan server pada perangkat lunak serta perangkat keras, perlindungan data, kemampuan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi, dan juga cara pemeliharaan aplikasi yang dilakukan selama penggunaannya.

4. Penyediaan Informasi pada Aplikasi SIPD secara Efektif dan Efisien.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di tingkat pemerintah daerah. Dengan adanya SIPD, informasi mengenai program-program pemerintah daerah dapat lebih mudah diakses oleh pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, sehingga memungkinkan adanya partisipasi yang lebih besar dalam proses pemerintahan daerah. Aplikasi SIPD dirancang untuk mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan anggaran, perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program dan kegiatan pemerintah daerah. Agar informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal, sangat penting untuk memastikan penyediaan informasi dalam aplikasi SIPD dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Penyediaan informasi yang efisien dan efektif dalam penerapan aplikasi SIPD bergantung pada beberapa faktor, seperti aksesibilitas, kualitas dan keamanan data, serta penggunaan teknologi yang sesuai.

Temuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyediaan informasi dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) bersifat transparan, yang mendukung pertukaran informasi secara cepat dan efisien bagi penggunanya. Aplikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa data dan informasi yang disediakan tidak hanya mudah diakses oleh pihak yang berwenang, tetapi juga disajikan dengan jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa faktor yang membuat aplikasi SIPD efektif dalam memfasilitasi pertukaran informasi antara lain akses yang terbuka dan terorganisir, integrasi dengan sistem lainnya, penyajian data yang mudah dimengerti, serta pengelolaan keamanan data yang baik.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan dan Pembahasan diatas maka peneliti menngambil kesimpulan sebagai berikut : Standard dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan pada penggunaan aplikasi Sistem Pemerintah Daerah sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, aplikasi SIPD juga bersifat terbuka namun aplikasi ini setiap tahunnya mengalami perubahan yang membuat para pegawai harus kembali belajar dalam penggunaan aplikasinya.

Kemudian Pada penggunaan aplikasi ini sumber daya (pengguna) sudah bisa dalam penggunaannya dan dalam penggunaan aplikasi ini memerlukan peran sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh kebijakan yang telah dirancang secara sistematis namun Pengguna aplikasi SIPD sering menghadapi masalah, terutama terkait dengan kestabilan jaringan yang sering mengalami gangguan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data, di mana pengguna harus menunggu jaringan kembali stabil sebelum melanjutkan proses penginputan. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada pengguna hanya dilakukan sekali, yaitu pada saat peluncuran aplikasi SIPD pertama kali. Adapun ketahanan sistem pada aplikasi SIPD dimana sudah berjalan dengan baik dan efektif, bahkan memudahkan para pegawai dalam mengelola data tetapi ada juga faktor yang mempengaruhinya yaitu stabilitas jaringan dan server pada perangkat lunak dan perangkat keras, perlindungan data, keterampilan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi, serta bagaimana pemeliharaan aplikasi dilakukan selama penggunaannya.

Kemudian penyediaan Penyediaan informasi dalam aplikasi SIPD dilakukan secara efektif dan efisien, dengan data yang terorganisir dengan rapi dalam struktur yang mudah dipahami dan digunakan. Keakuratan data sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu, penyediaan informasi dalam aplikasi SIPD bersifat transparan, yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung dengan cepat dan efisien bagi penggunaannya.

REFERENSI

- [1] M. I. Nasution and N. M.Si, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan,” *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 9, no. 2, p. 109, 2021, doi: 10.29103/jak.v9i2.4577.
- [2] Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” *Permendagri No 77 Tahun 2020*, pp. 1–445, 2020.
- [3] Aida Hayatun Thaiybah, Herlina Pusparini, and Robith Hudaya, “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Yang Lebih Berkualitas (Studi Pada Kantor Lurah Gerung Selatan),” *J. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 19–28, 2022, doi: 10.29303/risma.v2i1.182.
- [4] “Peran Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Mewujudkan ‘ Satu Data Sidoarjo ’”.
- [5] UU Pemerintah RI, “UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008),” *J. Teknol. Inf. dan Komun. STMIK ProVisi Semarang*, pp. 49–60, 2008.
- [6] A. Syahza and U. Riau, *Metodologi Penelitian*, no. September. 2021.
- [7] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, no. March. 2020. [Online]. Available: <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- [8] Y. Zamrodah, *Kebijakan Politik*, vol. 15, no. 2. 2016.
- [9] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, “UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,” *Peraturan.Bpk.Go.Id*, pp. 1–32, 2004, [Online]. Available: http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU NO 39 TAHUN 1999 HAM_0.pdf
- [10] R. A. Alhasni, F. H. Mamonto, and N. M. Onibala, *Buku ajar Kebijakan Publik*. Penerbit Tahta Media, 2024.
- [11] T. Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Digital,” *J. GEEJ*, vol. 7, no. 2, 2020.
- [12] J. Mantiri, *Buku Ajar Manajemen Pembangunan Daerah*. Penerbit Tahta Media, 2023.
- [13] Mulyasa, H. . (2021). Implementasi Kurikulum 2013 Revisi.
- [14] Hayat. (2018). *Buku Kebijakan Publik*. Intrans Publishing, September 2018, 121. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- [15] Anry Haposan U. P. Simanungkalit, S.Si., M. S. (2012). KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI (Review). Lecture Notes : Sistem Informasi, 1–10.